

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah angka kemiskinan yang relatif rendah dibandingkan sejumlah daerah lainnya di pulau Sumatera. Walaupun secara tertulis dalam bentuk angka Sumatera Barat memiliki angka kemiskinan yang relatif rendah, tetapi angka tersebut justru berbanding terbalik dengan nilai indeks gini Sumatera Barat pada tahun 2017 yang terus meningkat. Keadaan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data kemiskinan yang relatif menurun dengan angka ketimpangan pendapatan yang terus meningkat.

Ketimpangan pendapatan juga dikenal dengan nama disparitas pendapatan. Terjadinya ketidaksesuaian data antara angka kemiskinan dengan data ketimpangan pendapatan menjadi sebuah masalah serius yang harus dicermati, mengingat antara pertumbuhan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan memiliki korelasi yang positif. Disparitas pendapatan menjadi masalah utama yang dihadapi pemerintah Sumatera Barat mengingat masing masing daerah kota dan kabupaten memiliki sumber daya alam yang berbeda beda akibatnya pemerataan potensi sumber daya yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat relatif beragam.

Ketimpangan pendapatan yang terjadi di lingkungan masyarakat di Sumatera Barat tidak terbentuk dengan sendirinya akan tetapi dapat dipengaruhi oleh sejumlah variabel. Menurut Danawati dkk (2016) ketimpangan pendapatan dapat dipengaruhi akumulasi modal, akumulasi modal manusia dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia diperoleh data terlihat pada Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1
Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat
Pada 19 Kota dan Kabupaten Di Sumatera Barat
Tahun 2013 – 2017 (Satuan dalam Poin)

No	Nama Kabupaten / Kota	Indeks Gini				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kepulauan Mentawai	0.24	0.26	0.27	0.27	0.29
2	Pesisir Selatan	0.31	0.33	0.32	0.33	0.35
3	Sijunjung	0.22	0.24	0.26	0.24	0.26
4	Tanah Datar	0.21	0.21	0.23	0.24	0.23
5	Padang Pariaman	0.27	0.29	0.30	0.29	0.30
6	Agam	0.29	0.32	0.33	0.32	0.33
7	Limapuluh Kota	0.31	0.33	0.32	0.33	0.32
8	Pasaman	0.22	0.24	0.26	0.24	0.27
9	Solok Selatan	0.21	0.21	0.23	0.21	0.23
10	Dharmasraya	0.24	0.26	0.27	0.26	0.27
11	Kota Solok	0.31	0.33	0.32	0.33	0.32
12	Pasaman Barat	0.22	0.24	0.26	0.24	0.26
13	Padang	0.39	0.40	0.41	0.40	0.41
14	Solok	0.27	0.29	0.30	0.29	0.30
15	Sawahlunto	0.29	0.32	0.33	0.32	0.33
16	Padang Panjang	0.34	0.35	0.36	0.37	0.36
17	Bukittinggi	0.22	0.24	0.26	0.24	0.26
18	Payakumbuh	0.21	0.21	0.23	0.21	0.23
19	Pariaman	0.31	0.31	0.32	0.33	0.32
Rata Rata Sumatera Barat		0.25	0.27	0.28	0.29	0.30

Sumber BPS Sumatera Barat 2015

Pada tabel 1.1 terlihat terjadi kecenderungan peningkatan pendapatan masyarakat pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, yang diukur dengan indeks gini. Pada tahun 2013 nilai indeks Gini rata rata yang dimiliki kota dan kabupaten di Sumatera Barat adalah sebesar 0,25 poin. Pada tahun 2013 nilai indeks gini tertinggi dimiliki oleh Kota Padang yaitu sebesar 0,39 poin sedangkan nilai indeks gini terendah dimiliki oleh Kota Payakumbuh yaitu sebesar 0,21 poin Pada tahun 2014 yang lalu terjadi peningkatan rata rata nilai indeks gini kota dan kabupaten di Sumatera Barat menjadi 0.27 poin. Peningkatan indeks gini menunjukkan terjadinya peningkatan ketimpangan pendapatan masyarakat di Sumatera Barat. Pada tahun 2014 tersebut kota dengan koefisien indeks gini tertinggi adalah Padang yaitu sebesar 0,40 poin sedangkan daerah kota atau kabupaten dengan nilai indeks gini terkecil adalah

Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan dan Kota Payakumbuh, masing-masingnya memiliki koefisien gini sebesar 0,21 poin. Pada tahun 2015 yang lalu nilai rata-rata indeks gini kota dan kabupaten di Sumatera Barat masih terus meningkat, di tahun tersebut nilai indeks gini Sumatera Barat adalah 0,28 poin, dengan kota Padang sebagai kota dengan tingkat ketimpangan tertinggi yaitu mencapai 0,41 poin. Meningkatnya indeks gini yang dimiliki Padang menunjukkan terus meningkatnya jumlah ketimpangan pendapatan masyarakat yang terlihat dari pola konsumsi dan kualitas hidup masyarakat.

Memasuki tahun 2016 dan 2017 terjadi peningkatan nilai rata-rata indeks gini pada sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Peningkatan nilai indeks gini terjadi di Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 0.29 poin di tahun 2017 yang lalu. Kabupaten limapuluh kota yang mencapai 0.33 poin hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Sawahlunto. Jika diamati berdasarkan rata-rata indeks gini teridentifikasi jumlah tingkat pemerataan pendapatan di Sumatera Barat terus mengalami peningkatan dalam hal ini hingga akhir tahun 2017 yang lalu nilai indeks gini Sumatera Barat adalah 0.30 poin lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Perubahan indeks gini tidak terbentuk dengan sendirinya akan tetapi dapat dipengaruhi oleh sejumlah variabel menurut Wong dan Kiew (2014) disparitas pendapatan dapat diprediksi dengan mengamati perubahan variabel pengeluaran pemerintah, investasi, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah. Masing-masing variabel diduga dapat mempengaruhi peningkatan atau penurunan tingkat ketimpangan pendapatan khususnya yang diukur dengan Indeks Gini.

Sartono (2012) mendefinisikan pengeluaran pemerintah sebagai sejumlah dana yang dibelanjakan pemerintah untuk melakukan kegiatan pembangunan, mulai dari pengembangan infrastruktur, meningkatkan kualitas hidup seperti pengembangan

pelayanan kesehatan, pendidikan atau upaya produktif lainnya. Semakin besar pengeluaran pemerintah diduga akan dapat menambah lapangan kerja sehingga akan mendorong terjadinya pemerataan pendapatan sehingga mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan.

Disamping pengeluaran pemerintah, terjadinya peningkatan atau penurunan ketimpangan pendapatan di sebuah daerah khususnya di Sumatera Barat dapat dipengaruhi oleh investasi. Menurut Todaro (2012) investasi merupakan kegiatan penanaman modal baik yang dilakukan pihak pemerintah atau pun pihak swasta pada berbagai aspek kehidupan. Pengembangan investasi juga menjadi peluang akan terjadinya penambahan lapangan kerja, adanya kawasan belikat, kawasan industri hingga aglomerasi akan memberikan peluang kerja yang lebih besar sehingga diduga akan mendorong adanya pemerataan pendapatan sekaligus menunjukkan terjadinya penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat.

Menurut Zhang et al (2015) ketimpangan pendapatan dapat mengalami penurunan ketika sebuah daerah memiliki peluang atau kesempatan kerja yang tinggi bagi penduduknya. Peluang kerja meningkat karena perputaran pendapatan masyarakat yang tinggi. Meningkatnya kesempatan kerja ketika sebuah daerah memiliki sumber daya yang dapat dikembangkan. Selain itu peningkatan kesempatan kerja dapat didorong dengan adanya konsep wirausaha yang dilakukan oleh masyarakatnya.

Disamping pengeluaran pemerintah, investasi, dan kesempatan kerja, ketimpangan pendapatan juga dapat disebabkan karena ketidak merataan pertumbuhan ekonomi. Salah satu ukuran yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebuah negara adalah Product Domestic Regional Bruto (PDRB). Menurut Samuelson (2012) product domestic bruto menunjukkan pendapatan total masyarakat

atau warga negara sebuah negara. Semakin tinggi pendapatan yang dimiliki masyarakat menunjukkan semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat tentu di iringi dengan pemerataan pendapatan sehingga dapat menurunkan tingkat disparitas pendapatan.

Berdasarkan kepada uraian ringkas latar belakang penelitian serta adanya dukungan hasil sejumlah penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk mencoba mengamati sejumlah variabel yang dapat mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat khususnya pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah peneliti mengajukan sejumlah perumusan masalah yang akan dibuktikan dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat”

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat pada 19 kabupaten dan kota di Sumatra Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diharapkan hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat positif :

1. Bagi pemerintah daerah hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi yang berguna dalam pengambilan kebijakan strategis dibidang

perekonomian secara menyeluruh untuk mengurangi kesenjangan pendapatan khususnya pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

2. Akademisi hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain yang juga tertarik untuk melakukan penelitian yang sama dengan permasalahan didalam penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara umum penelitian yang dilakukan saat ini terdiri dari sejumlah sub bab yang dapat dibuat kedalam sebuah sistematika yaitu:

Bab I Pendahuluan merupakan bab yang menjelaskan latar belakang pengambilan judul, uraian pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis merupakan bab yang menjelaskan tentang sejumlah teori yang relevan dengan permasalahan yang diajukan. Pada bab ini juga akan diketahui keterkaitan antara masing masing variabel independen dengan variabel dependen, serta adanya rumusan hipotesis dan model kerangka konseptual yang akan dipedomani dalam tahapan pengolahan data.

Bab III Metodologi Penelitian adalah bab yang akan menjelaskan tentang proses penentuan populasi, sampel, jenis dan sumber daya yang digunakan, definisi operasional dan pengukuran variabel serta metode analisis yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hipotesis.

Bab IV Gambaran Umum Variabel Penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan tentang gambaran umum masing masing variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian yang meliputi disparitas pendapatan, pengeluaran pemerintah, investasi,

kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Bab V Analisis Hasil dan Pembahasan Merupakan bab yang menjelaskan tentang analisis hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian yang diperoleh. Dalam bab ini juga akan dijelaskan tentang keterkaitan antara teori dan hasil penelitian yang diperoleh.

Bab VI Penutup merupakan bab yang akan menjelaskan tentang kesimpulan hasil pengujian hipotesis, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

